

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
MANAJEMEN LITERASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI
BELAJAR SISWA MELALUI MUSYAWARAH GURU MATA
PELAJARAN (MGMP) BAHASA INDONESIA

A. Landasan Filosofis

Manajemen literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menerapkan dan menggunakan konsep manajemen dalam konteks organisasi atau bisnis. Literasi merupakan kemampuan linguistik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti ; membaca, menulis, melihat, menyimak dan berbicara. Cara meningkatkan literasi dengan : membiasakan membaca sejak dini, membangun lingkungan belajar yang kondusif, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, berpikir kritis, mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif. Contoh program literasi: pojok literasi, mading, duta literasi sekolah, kunjungan rutin ke perpustakaan, resume bacaan di koran, lomba menulis, dan membaca buku 15 menit sebelum belajar

Pendidikan modern menuntut literasi tidak sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup keterampilan berpikir kritis, memahami makna secara mendalam, mampu mengolah makna dan mengomunikasikan informasi dengan efektif. Peningkatan literasi siswa menjadi tantangan utama dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menuntut pemahaman teks secara komprehensif dan kemampuan berargumentasi yang kuat. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam mengembangkan strategi pembelajaran berbasis literasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran bukan sekadar proses menerima informasi secara pasif, tetapi merupakan pengalaman aktif di mana siswa membangun pemahamannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman sebelumnya, serta keterlibatan dalam diskusi dan refleksi. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, konstruktivisme mengarahkan siswa untuk

tidak sekadar membaca dan menghafal isi teks, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari.

Manajemen literasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berperan penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan mengadopsi pendekatan konstruktivisme, MGMP Bahasa Indonesia dapat merancang strategi literasi yang tidak hanya berfokus pada pemahaman teks, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, serta refleksi diri. Dengan melibatkan siswa dalam pengalaman membaca dan menulis yang bermakna, literasi tidak lagi hanya menjadi keterampilan akademik, tetapi juga menjadi bagian dari budaya belajar yang berkelanjutan.

Sebagai wadah profesional bagi guru, MGMP dapat menjadi motor penggerak dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi literasi yang efektif. Dengan demikian, melalui pendekatan konstruktivisme yang diterapkan dalam manajemen literasi, diharapkan prestasi belajar siswa dapat meningkat secara signifikan, menciptakan generasi yang tidak hanya cakap dalam membaca dan menulis, tetapi juga mampu berpikir kritis dan berkontribusi dalam masyarakat berbasis pengetahuan.

Secara Filosofis, Konstruktivisme menjadi latar belakang bagi kajian penelitian mengenai manajemen literasi oleh MGMP Bahasa Indonesia SMP Negeri Jakarta. Dalam konteks pendidikan, konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui manusia secara aktif membangun pemahaman mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan (Dewi, 2019).

Konstruktivisme adalah ‘suatu pendekatan pembelajaran yang berpendapat bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuan mereka sendiri dan kenyataan itu ditentukan oleh pengalaman belajar’ Suharyanto H soro dalam (Elliott et al.,2000, hal 256)

Dari pendapat di atas, bahwa konstruktivisme merupakan proses pembelajaran anak baik melalui pendidikan informal, formal dan non formal untuk mendapatkan perubahan mental di masa depan sebagai bekal dalam hidupnya. Bidang pendidikan dipengaruhi oleh konstruktivisme melalui teorinya tentang

belajar dan pembelajaran. Menurut konstruktivisme, belajar dilihat seperti yang tertuang dalam kutipan berikut ini:

Learning is view as a regulatory process of struggling with the conflict between existing personal models of the world and discrepant new insight, constructing new representation and models of reality as a human meaning making venture with culturally develop tool and symbols, and further negotiating such meaning through cooperative social activity, discourse and debate (Sit et al., 2016)

Dengan demikian, menurut konstruktivis belajar didefinisikan sebagai mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman konkret melalui aktivitas refleksi, kolaborasi, dan interpretasi. Jenis aktivitas ini memungkinkan siswa memperoleh pemahaman yang berbeda tentang materi berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan perspektif yang mereka gunakan untuk menginterpretasikannya. Pembelajaran berarti mengatur lingkungan siswa agar proses belajar terjadi, yaitu interaksi mereka dengan lingkungan mereka. Di dalamnya terdapat lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan yang lebih besar dan lama yakni masyarakat dan pemerintah. Turut berperan dalam proses pembelajaran siswa.

Selanjutnya teori konstruktivisme akan lebih diperdalam dengan filsafat kognitivisme. Kognitivisme memberikan landasan filosofis dimana paradigma ini menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk mengolah informasi yang masuk, sehingga terbentuk pengetahuan baru menuju pembentukan sesuatu kompetensi yang dikehendaki siswa (Mudjiman, 2009).

Menurut Jerome Bruner, kognitivisme adalah pembelajaran yang lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa. Dalam proses pembelajaran menekankan pentingnya memahami bagaimana siswa memproses informasi dan bagaimana guru dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan siswa. Maka teori kognitivisme lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian dari pada peristiwa-peristiwa Internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme, lebih dari itu belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks (Nurhadi, 2020).

Cognitivisme memberikan landasan mendalam yang menekankan pada proses pembelajaran seperti bagaimana informasi diorganisir dan disimpan dalam memori serta bagaimana struktur mental membantu siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, ketrampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas (Nurhadi, 2020)

Dalam implementasinya, teori cognitivisme dalam manajemen literasi siswa dengan cara pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan agar siswa dapat langsung bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran dapat berkesinambungan atau saling terkait dengan kognitif yang sudah dimiliki oleh siswa. Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Dengan demikian, siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar dan memahami materi dengan lebih baik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan, agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka.

Penggunaan model-model pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan berpikir siswa. Misalnya, untuk siswa yang masih dalam tahap sensorimotor, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis lingkungan. Guru harus memberikan perlakuan yang tepat bagi siswa, misalnya dalam memilih cara penyampaian materi bagi siswa sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh siswa. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah memahami materi dan meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Dengan demikian, teori cognitivisme dalam kontek

manajemen literasi dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, siswa dapat memproses informasi dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Guru dapat menyediakan strategi dan alat yang sesuai untuk mendukung proses belajar siswa.

B. Landasan Sistem Nilai

Selain mengacu pada landasan filosofis, penelitian ini juga berpijak pada sistem nilai sebagaimana dimaksud dalam teori sistem nilai yang dinyatakan oleh (Sanusi, 2006). Sistem nilai ini bermanfaat bagi siapapun dalam memahami kompleksitas kehidupan agar kompleksitas tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan mengancam, namun dapat dijadikan peluang untuk kelancaran tugas-tugas keseharian. Keenam sistem nilai itu adalah: Nilai Teologik, Nilai Logik, Nilai Fisiologik, Nilai Etik, Nilai Estetik, Serta Nilai Teleologik.

Enam sistem nilai ini akan digunakan sebagai landasan dalam mendeskripsikan Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta.

Sebagaimana dipahami bahwa realitas kehidupan manusia seringkali berhadapan dengan situasi di mana persoalan baik dan buruk menjadi demikian pelik. Kondisi ini memaksa setiap manusia dihadapkan dengan pilihan-pilihan moral yang tidak dengan serta merta semudah memilah antara hitam dan putih. Kehidupan yang kompleks diikuti dengan perubahan yang cepat, serta persaingan yang tak bisa dibendung semakin membuat permasalahan menjadi runcing. Kemajuan filsafat, sains dan teknologi, menghasilkan kebudayaan yang semakin berkembang, yang disebut globalisasi kebudayaan. Namun kebudayaan yang semakin berkembang ternyata sangat berdampak terhadap aspek moral.

Sanusi (2009) menjelaskan bahwa terdapat enam system nilai dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, yaitu:

1. Nilai Teologis

Nilai Teologis mengacu pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam Islam, konsep ketuhanan berpusat pada keyakinan kepada Allah SWT, sebagaimana terkandung pada ajaran Islam mencakup iman, Islam, dengan ihsan.

Iman mencerminkan keyakinan kepada:

- a. Keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan beserta sifat-sifat-Nya.
- b. Keberadaan malaikat-malaikat Allah.
- c. Kitab-kitab suci diturunkan perlu Allah.
- d. Para nabi dengan rasul sebagai utusan Allah.
- e. Kepastian adanya hari kiamat.
- f. Ketentuan takdir (qada dengan qadar) baik maupun buruk.

Islam, sebagai praktik keimanan, memiliki lima rukun utama:

- a. Mengucapkan syahadat sebagai bentuk pengakuan akan keesaan Allah dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW.
- b. Melaksanakan salat lima waktu.
- c. Menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial.
- d. Berpuasa di bulan Ramadan.
- e. Menunaikan ibadah haji bagi mampu.

Ihsan memiliki dua dimensi utama, yaitu:

- a. Hubungan dengan Allah, yaitu beribadah seolah-olah melihat-Nya, atau meyakini bahwa Allah selalu mengawasi.
- b. Hubungan dengan sesama makhluk, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dengan lingkungan sekitar.

Nilai teologis sudah tertanam pada diri manusia bahkan sebelum mereka diciptakan secara fisik, sebagaimana firman Allah pada QS. Al-A'raf: 172 menegaskan bahwa setiap manusia telah bersaksi atas keesaan-Nya di alam ruh.

Ketika nilai teologis diterapkan pada kehidupan, ia memberikan ketenangan jiwa dengan raga bagi pemeluknya. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mampu menjadi dasar pada membentuk pola pikir dengan perilaku

seorang Muslim berlandaskan kebenaran dengan hukum Islam. Implementasi Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta pada perspektif teologis merupakan bentuk ikhtiar pada mengelola sekolah secara terencana dengan sistematis, guna menciptakan lingkungan pendidikan bercirikan Islam mampu melahirkan generasi berprestasi dengan meningkatkan prestasi belajar siswa selaras dengan ajaran-Nya.

2. Nilai Logik

Implementasi Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta mampu dikategorikan sebagai nilai logik, berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dengan mengingat. Nilai ini menjadi dasar pada bertindak dengan mengambil keputusan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berulang kali menyeru manusia menggunakan akalnya, seperti pada QS. Ali Imran: 190, menegaskan bahwa penciptaan alam semesta merupakan tanda bagi orang-orang berpikir.

Allah juga berfirman pada QS. An-Nahl: 67, menunjukkan bahwa pemanfaatan akal mampu membantu manusia membedakan antara bermanfaat dengan merugikan.

Berpikir secara logis harus terus berkembang identik dengan usia dengan tingkat kematangan seseorang. Jika bayi menggunakan naluri, anak-anak berpikir secara imitatif (meniru), maka orang dewasa harus mampu berpikir kreatif dengan inovatif, serta menghindari pola pikir egois. Dalam dunia pendidikan, nilai logik ini harus terus diterapkan perlu pemerintah maupun tenaga pendidik agar pengambilan keputusan pada sistem pendidikan selalu berbasis rasionalitas dengan manfaat.

Akal juga berperan pada membedakan antara benar dengan batil, serta memperkuat keimanan seseorang. Dalam QS. Ali Imran: 7, Allah

menegaskan bahwa hanya orang-orang berakal mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Nya.

Dalam Islam, akal memiliki kedudukan tinggi dengan sering dimanfaatkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta pengajaran agama. Beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa Islam agama rasional mengedepankan pemikiran logis dengan argumentasi. Namun, pada pemikiran Islam, akal tetap berada di bawah wahyu. Akal digunakan memahami wahyu, bukan menentangnya. Oleh karena itu, pada Islam tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu, melainkan keduanya saling melengkapi pada menjelaskan kebenaran.

3. Nilai Fisik/Fisiologi

Nilai fisiologis berkaitan dengan pemanfaatan fungsi fisik pada kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, tubuh manusia merupakan ciptaan Allah memiliki manfaat besar, namun sering kali potensi ini tidak dimaksimalkan. Hal ini menyebabkan umat Islam tertinggal pada bidang sains dengan teknologi. Al-Maududi, seorang pembaharu Islam, mengkritik umat Islam tidak mengoptimalkan potensi diberikan Allah, seperti pendengaran (as-sam'), penglihatan (al-bashar), dengan hati (fuad). Dalam QS. An-Nahl: 78, Allah menjelaskan bahwa ketiga anugerah ini diberikan agar manusia bersyukur dengan menggunakannya kebaikan.

Dalam perspektif pendidikan, implementasi Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta juga didasarkan pada nilai fisiologis. Islam mengajarkan umatnya menjaga kesehatan dengan kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Praktik seperti berwudhu, mandi janabah, serta penggunaan air pada bersuci menunjukkan bahwa Islam menekankan kebersihan fisik.

Selain itu, ibadah puasa juga memberikan manfaat kesehatan dengan memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan, bekerja tanpa henti selama 11 bulan. Dengan menerapkan gaya hidup sehat identik

ajaran Islam, umat Muslim mampu lebih optimal pada menjalankan perannya, termasuk pada dunia pendidikan.

Dengan demikian, penerapan Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta tidak hanya melibatkan aspek spiritual dengan intelektual, tetapi juga aspek fisik, sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan seimbang, sehat, dengan berkualitas.

4. Nilai Etik

Nilai etik mencakup sikap hormat, mampu dipercaya, serta keadilan, semuanya berhubungan erat dengan akhlak seseorang. Namun, pada realitas kehidupan saat ini, nilai-nilai tersebut sering kali terabaikan, baik perlu individu kurang berpendidikan maupun mereka memiliki latar belakang akademik tinggi.

Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan penting, sebagaimana ditegaskan pada Al-Qur'an bahwa Rasulullah suri teladan terbaik bagi umat manusia:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan baik bagimu (yaitu) bagi orang mengharap (rahmat) Allah dengan (kedatangan) hari kiamat dengan Dia banyak menyebut Allah" (Q.S. Al-Ahzab: 21).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan pada hadis bahwa beliau diutus menyempurnakan akhlak manusia:

"Saya diutus menyempurnakan budi pekerti (akhlak)." (Hadis Nabi)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jika tidak diiringi perlu nilai-nilai etika, maka kemajuan tersebut justru mampu menjadi ancaman bagi umat manusia. Hal ini terlihat pada berbagai kasus seperti peperangan dengan eksploitasi lingkungan akibat pemanfaatan ilmu tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Dalam konteks pendidikan, Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta menjadi salah satu bentuk penerapan ilmu mengelola lembaga pendidikan secara efektif. Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta bertujuan Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa melalui prinsip-prinsip manajemen baik dengan berbasis nilai-nilai etika.

5. Nilai Estetika pada Pendidikan

Nilai estetika berkaitan dengan keindahan, keseimbangan, dengan keharmonisan, baik pada hubungan sosial maupun pada lingkungan sekitar. Allah menciptakan alam dengan segala keindahannya tidak hanya dimanfaatkan tetapi juga agar manusia mampu merasakan keteraturan dengan keseimbangan di dalamnya. Kasih sayang dengan keindahan merupakan bagian dari fitrah manusia dianugerahkan perlu Allah SWT, sebagaimana disebutkan pada Al-Qur'an:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dengan merasa tenteram kepadanya, dengan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dengan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir." (Q.S. Ar-Ruum: 21)

Dalam upaya meningkatkan Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta, aspek estetika berperan penting, terutama pada gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan metode pembelajaran digunakan perlu para guru. Seorang pemimpin pendidikan perlu mencontoh seni kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan kelembutan pada berkomunikasi, berbicara dengan intonasi baik, serta membangun

hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dengan bermusyawaratlah dengan mereka pada urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S. Ali Imran: 159)

6. Nilai Teleologi pada Pendidikan

Nilai teleologi berorientasi pada manfaat, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dengan akuntabilitas pada setiap aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu diperintahkan atau dilarang memiliki hikmah dengan manfaat bagi manusia serta lingkungannya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dengan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dengan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'." (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Rasulullah SAW juga bersabda:

"Sebaik-baik kamu orang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (Hadis Nabi)

Dalam pandangan materialisme, alam dianggap tidak memiliki sasaran tertentu karena diyakini ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Teori evolusi, misalnya, menganggap bahwa kehidupan berlangsung sebagai hasil seleksi alam. Namun, pada Islam, setiap ciptaan Allah memiliki sasaran telah ditetapkan-Nya. Seluruh unsur di alam semesta, mulai dari mikroorganisme hingga makhluk besar seperti paus dengan gajah, saling bergantung menciptakan keseimbangan ekosistem sempurna.

Konsep teleologi ini juga relevan pada konteks pendidikan, terutama pada Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta bertujuan agar sistem pendidikan berjalan secara efisien, produktif, dengan memberikan manfaat lebih baik bagi peserta didik serta masyarakat secara luas. Dengan demikian, Manajemen Literasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri 34 Dan SMP Negeri 95 Jakarta menjadi salah satu ikhtiar pada mewujudkan cita-cita pendidikan lebih maju dengan identik dengan kebijakan berlaku di Indonesia.

C. Landasan Teori/Konsep

1. Landasan Manajemen

Manajemen suatu tahap pada mengelola, mengatur, serta memanfaatkan berbagai sumber daya pada sebuah organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan George R. Terry (1972:4) menyatakan bahwa "Manajemen merupakan suatu tahap mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengendalian dilakukan menentukan serta menca sasaran tertentu dengan memanfaatkan manusia dengan sumber daya lainnya."

Berdasarkan arti tersebut, manajmen mampu diartikan sebagai tahap pengelolaan pada suatu lembaga pendidikan, khususnya. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengawasan agar sasaran lembaga mampu terca dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal, efektif, dengan efisien.

Manajemen merujuk pada prestasi atau pencaan seseorang pada pekerjaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja diartikan sebagai:

- a. sesuatu berhasil dica,
- b. prestasi ditunjukkan, serta
- c. kemampuan pada bekerja.

Kualitas sumber daya manusia mampu diukur berdasarkan kinerjanya atau tingkat produktivitasnya. Dalam konteks organisasi, kinerja menjadi tolok ukur keberhasilan pada menca sasaran telah ditetapkan. Maier (pada Notoatmodjo, 2015:124) menartikan kinerja sebagai keberhasilan individu pada menjalankan tugas diberikan kepadanya. Sementara itu, menurut Gilbert (pada Notoatmodjo, 2015:124), kinerja merupakan hasil kerja dilakukan seseorang identik dengan tugas dengan fungsinya.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, Notoatmodjo (2015:124) merangkum bahwa Manajemen hasil kerja atau performa ditampilkan perlu seorang pegawai, mampu diukur melalui hasil tugas dengan kegiatan pada kurun waktu tertentu. Robbin (2016:260) menyatakan bahwa manajemen merupakan hasil dicapai perlu pegawai pada pekerjaannya berdasarkan kriteria tertentu berlaku pada suatu jabatan. Sementara itu, John Whitmore (1997:104) menartikan kinerja sebagai pelaksanaan suatu fungsi menuntut keterampilan tertentu, sehingga mampu dipandang sebagai suatu pencaan atau prestasi kerja.

Mangkunegara (2013:67) menjelaskan bahwa manajemen, atau prestasi kerja, merupakan hasil kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas dica perlu pegawai pada menjalankan tugasnya identik dengan tanggung jawab diberikan. Lebih lanjut, Handoko (2000:135) menegaskan bahwa manajemen pada dasarnya aktivitas dengan hasil dica perlu individu atau kelompok pada melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini berarti bahwa seseorang harus mampu memenuhi target atau standar kerja telah ditentukan perlu organisasi pada periode tertentu, atau bahkan melampauinya.

Dalam penelitian ini, teori manajemen digunakan mengacu pada pendapat Gibson et al. (1996:118), menyatakan bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang pada menjalankan tugasnya dengan kemampuannya pada menca sasaran telah ditetapkan. Berdasarkan kerangka konseptual mengacu pada teori Gibson pada Supriadi (2014:31), kinerja dipengaruhi perlu tiga faktor utama, yaitu faktor individu, faktor psikologis, dengan faktor organisasi.

1. **Faktor Individu** mencakup aspek seperti kemampuan, keterampilan, demografi, serta latar belakang individu atau kelompok pada organisasi. Kemampuan

dengan keterampilan menjadi elemen utama menentukan perilaku kerja serta kinerja pegawai. Sementara itu, faktor demografi dengan latar belakang seseorang atau kelompok memiliki dampak tidak langsung terhadap pencaan kinerja.

2. **Faktor Psikologis** meliputi aspek persepsi, sikap, kepribadian, motivasi, serta tahap belajar. Faktor ini dipengaruhi perlu berbagai elemen seperti lingkungan keluarga, status sosial, pengalaman kerja sebelumnya, serta kondisi demografi individu atau kelompok pada suatu organisasi.
3. **Faktor Organisasi** mencakup desain pekerjaan, kepemimpinan, struktur organisasi, ketersediaan sumber daya, serta sistem penghargaan dengan imbalan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, kinerja memiliki peran penting bagi seluruh sumber daya manusia terlibat. Penilaian kinerja tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu mendapatkan perhatian dari pimpinan, tetapi juga mampu meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya evaluasi kinerja, pegawai berprestasi memiliki peluang mendapatkan promosi, pengembangan kompetensi, atau penghargaan. Sebaliknya, pegawai dengan kinerja rendah mungkin akan mengalami penurunan jabatan atau konsekuensi lain identik.

Dari penjelasan tersebut, mampu disimpulkan bahwa manajemen merupakan pencapaian hasil pada menjalankan tugas identik dengan tanggung jawab diberikan. Peningkatan kinerja akan berdampak positif bagi organisasi atau lembaga. Dalam konteks, pencaan target kinerja menjadi salah satu sasaran utama. Keberhasilan pada mencapai sasaran tersebut bergantung pada kualitas sumber daya manusia dimilikinya.

Manajemen suatu tahap melibatkan pengelolaan, pengaturan, dengan pemanfaatan sumber daya pada suatu organisasi. George R. Terry (1972:4) menyatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian tahap mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengendalian, dilakukan menentukan serta menca sasaran telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

Griffin (2013) menambahkan bahwa manajemen mencakup serangkaian aktivitas seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian,

kepemimpinan, dengan pengendalian diarahkan pada sumber daya organisasi—baik manusia, finansial, fisik, maupun informasi—guna menca sasaran secara efisien dengan efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen diartikan sebagai tahap pemanfaatan sumber daya secara optimal guna menca sasaran tertentu. Dalam praktiknya, konsep manajemen sering dikaitkan dengan administrasi. E. Mulyasa (2007:19) menjelaskan bahwa terdapat tiga pandangan terkait hubungan antara manajemen dengan administrasi. Pertama, administrasi dianggap lebih luas daripada manajemen, di mana manajemen merupakan inti dari administrasi. Kedua, manajemen dianggap lebih luas daripada administrasi. Ketiga, manajemen dengan administrasi dipandang sebagai konsep identik.

Dalam perspektif Islam, meskipun istilah manajemen tidak disebutkan secara eksplisit pada Al-Qur'an, konsepnya tercermin pada kata *yudabbiru* berarti mengarahkan, melaksanakan, mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, serta menyusun rencana telah ditetapkan. Kata ini terdapat pada beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. Yunus (10:31), Q.S. Ar-Ra'd (13:2), dengan Q.S. As-Sajadah (32:5).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, manajemen mampu disimpulkan sebagai suatu tahap terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan pengawasan, dilakukan menca sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya secara efektif dengan efisien.

2. Konsep Literasi

a. Definisi Literasi

Literasi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Proses pendidikan sebagian besar bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1, menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dengan pendidikan menengah harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan menerapkan prinsip literasi.

Menurut Hadiyanto (2004:63), literasi pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa tahap pendidikan tidak mampu berjalan optimal jika sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Pendidikan bukanlah sebuah tahap mekanis seperti di pabrik mampu beroperasi secara otomatis setelah program dijalankan. Sebaliknya, pendidikan melibatkan interaksi antara berbagai elemen input serta keterkaitan hasil pendidikan dengan lingkungan sekitarnya.

Secara etimologis, literasi diartikan sebagai tahap pemanfaatan sumber daya secara efektif menca sasaran; *berbasis* berasal dari kata *basis*, berarti dasar atau asas; sedangkan literasi merujuk pada lembaga pendidikan tempat tahap belajar-mengajar berlangsung. Dengan demikian, literasi mampu dimaknai sebagai pengelolaan sumber daya berpusat pada literasi pada menjalankan tahap pembelajaran.

E. Mulyasa (2007:24) menjelaskan bahwa literasi merupakan bagian dari reformasi pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Otonomi pada manajemen memberikan kesempatan bagi literasi mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara langsung, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Dalam pendekatan literasi, pola pengelolaan pendidikan mengalami pergeseran dari sistem sepenuhnya dikendalikan perlu pemerintah pusat menuju sistem memberikan kewenangan lebih besar kepada literasi itu sendiri. Nanang Fatah (2003:8) menegaskan bahwa literasi strategi bertujuan merancang ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan kepada kepala serta meningkatkan partisipasi masyarakat—termasuk guru, siswa, komite, orang tua, dengan masyarakat—pada upaya meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Sistem ini mengubah mekanisme pengambilan keputusan dengan mendistribusikan kewenangan kepada para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, literasi model pengelolaan pendidikan memberikan otonomi lebih besar pada pengelolaannya. Pergeseran paradigma ini memungkinkan lebih mandiri pada mengambil keputusan, memanfaatkan sumber daya internal secara optimal, serta melibatkan seluruh elemen termasuk kepala,

tenaga pendidik, siswa, orang tua, dengan masyarakat—guna meningkatkan mutu pendidikan identik dengan kebijakan pendidikan nasional dengan regulasi berlaku.

b. Dimensi Literasi

Literasi adalah konsep yang mencakup berbagai dimensi yang berbeda, terutama di era sekarang ini, Penerapan literasi di berbagai sekolah di Indonesia telah dilakukan, meskipun masih terdapat indikasi ketidaksiapan pada pelaksanaannya. Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap sekolah, sementara pada kenyataannya, masih menghadapi tantangan pada hal tenaga pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen.

Literasi memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi pada literasi memungkinkan menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala juga didorong semakin profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer.

Lebih jauh, literasi mendorong dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan warga sekolah dengan masyarakat, diperlukan pengelolaan pendidikan menerapkan literasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 27, disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dengan pengawasan pendidikan pada jenjang anak usia dini, dasar, dengan menengah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah. Implementasi literasi harus mencerminkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dengan akuntabilitas.

Lima prinsip utama pada pelaksanaan literasi sebagai berikut:

a. Kemandirian

Mandiri diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan tanpa terlalu

bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian mampu dibangun melalui berbagai strategi, seperti pengembangan unit usaha, kerja sama dengan pihak eksternal di bidang komersial, serta inisiatif lain mampu meningkatkan pendapatan dengan program pendidikan.

b. **Kemitraan**

Prinsip kemitraan mengacu pada kerja sama antara dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan utama dari kemitraan meningkatkan keterlibatan serta dukungan masyarakat pada bentuk moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan dijalin mampu disesuaikan dengan keperluan dengan kondisi, dengan memastikan bahwa kerja sama dibangun bersifat saling menguntungkan.

c. **Partisipasi**

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan pada berbagai aspek pengelolaan, mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pendidikan. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini memperkuat kontribusi para pihak, memberdayakan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil mencerminkan aspirasi mereka. Partisipasi mampu ditingkatkan melalui penyediaan sarana komunikasi, advokasi, publikasi, serta transparansi terhadap seluruh pihak terlibat.

d. **Keterbukaan**

Sebagai institusi pendidikan melayani masyarakat, perlu menerapkan prinsip keterbukaan pada pengelolaannya. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap program dijalankan perlu. Salah satu cara mampu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi menyamakan rencana serta laporan kegiatan telah dengan akan dilaksanakan.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan aspek penting pada pengelolaan, menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dengan keputusan diambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, mampu menyusun pedoman pemantauan

kinerja, merancang strategi pengembangan, serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dengan masukan dari masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan literasi mampu berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat peran pada menciptakan lingkungan belajar lebih mandiri, inovatif, dengan berorientasi pada keperluan peserta didik serta masyarakat.

c. Pentingnya Literasi dalam Konteks Pendidikan

Literasi dianggap sebagai dasar bagi pendidikan karena hampir semua bentuk pembelajaran memerlukan kemampuan membaca dan menulis. Penerapan literasi bertujuan meningkatkan keterlibatan warga dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tanggung jawab kepala, mendorong kompetisi sehat antar lembaga pendidikan, serta meningkatkan efisiensi, relevansi, dengan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

Keberhasilan implementasi literasi ditentukan perlu efektivitas pada melakukan perencanaan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan. Menurut Ahmad Rozikun dengan Namabuddin (2001:13), kesuksesan literasi memerlukan waktu panjang serta kehati-hatian pada pelaksanaannya. Mereka mengemukakan delapan strategi utama pada menca keberhasilan literasi:

1. Demokratisasi pada Pendidikan

Keputusan dengan program diterapkan harus melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kegagalan pada satu kebijakan sering kali disebabkan perlu kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan, misalnya pada restrukturisasi tidak diimbangi dengan sosialisasi serta dukungan finansial.

2. Membangun Sinergi Perubahan

Dengan diterapkannya literasi, peran Departemen Agama, kepala, guru, dengan staf mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama pada suasana tanggung jawab bersama demi menca keberhasilan.

3. Pengembangan Wawasan dengan Keterampilan Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan faktor kunci pada literasi. Kepala dengan guru harus mampu mengembangkan wawasan serta keterampilan kepemimpinan mereka

agar mampu mengekspresikan kreativitas dengan inovasi pada strategi peningkatan kualitas pendidikan.

4. Merumuskan Visi Bersama

Penyusunan visi secara kolaboratif sejak awal akan mempererat kerja sama antara anggota. Visi tersebut harus jelas, realistis, dengan menggambarkan harapan semua pihak, termasuk orang tua, siswa, guru, dengan staf.

5. Pengembangan Keahlian dengan Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis penting pada menghadapi perubahan keperluan, standar pendidikan, serta tuntutan keterlibatan orang tua dengan masyarakat. Dengan demikian, majelis mampu bekerja secara independen pada menyusun program mendukung peningkatan mutu pendidikan.

6. Meningkatkan Lingkungan Kerja Kondusif

Keberhasilan literasi bergantung pada perubahan nyata dirasakan perlu semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan serta kondisi kerja mendukung efektivitas pelaksanaan literasi.

7. Memahami Dinamika Kelompok

Setiap anggota perlu memahami dinamika kelompok pada organisasi pendidikan. Proses ini mencakup tahap pembentukan awal, penyelesaian konflik, hingga pengasahan strategi produktif. Dengan pendekatan sistematis, mampu lebih efektif pada menetapkan sasaran serta melaksanakan perbaikan.

8. Menjelaskan Akuntabilitas

Akuntabilitas pada literasi harus mencakup aspek kerja sama antara Mapenda, Majelis, kepala, dengan guru. Akuntabilitas harus dikomunikasikan secara jelas dengan terstruktur, menjadi pedoman pada interaksi antar individu, serta diterapkan di setiap tingkatan pada organisasi.

Kebijakan literasi pada aspek pengembangan kurikulum, pembelajaran, dengan evaluasi harus didelegasikan ke agar lebih fleksibel pada memenuhi keperluan peserta didik dengan masyarakat. Pemerintah pusat, pada hal ini Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, bertindak sebagai regulator dengan menetapkan standar nasional, sementara implementasi dengan

pengembangannya menjadi tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi faktor utama pada keberhasilan penerapan literasi.

2. Manajemen Literasi di Sekolah

a. Peran Manajemen Literasi

Peran manajemen literasi dalam pendidikan sangat penting sebagai pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan upaya untuk meningkatkan literasi diberbagai konteks, baik itu dilingkungan pendidikan formal maupun non formal.

Dalam konteks lembaga pendidikan, kinerja memiliki peran penting bagi seluruh sumber daya manusia terlibat. Penilaian kinerja tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu mendapatkan perhatian dari pimpinan, tetapi juga mampu meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya evaluasi kinerja, pegawai berprestasi memiliki peluang mendapatkan promosi, pengembangan kompetensi, atau penghargaan. Sebaliknya, pegawai dengan kinerja rendah mungkin akan mengalami penurunan jabatan atau konsekuensi lain identik.

Dari penjelasan tersebut, mampu disimpulkan bahwa manajemen merupakan pencapaian hasil pada menjalankan tugas identik dengan tanggung jawab diberikan. Peningkatan kinerja akan berdampak positif bagi organisasi atau lembaga. Dalam konteks, pencaan target kinerja menjadi salah satu sasaran utama. Keberhasilan pada mencapai sasaran tersebut bergantung pada kualitas sumber daya manusia dimilikinya.

Penerapan literasi di berbagai sekolah di Indonesia telah dilakukan, meskipun masih terdapat indikasi ketidaksiapan pada pelaksanaannya. Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap sekolah, sementara pada kenyataannya, masih menghadapi tantangan pada hal tenaga pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen.

Literasi memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi

pada literasi memungkinkan menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala juga didorong semakin profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer.

Lebih jauh, literasi mendorong dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan warga sekolah dengan masyarakat, diperlukan pengelolaan pendidikan menerapkan literasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 27, disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dengan pengawasan pendidikan pada jenjang anak usia dini, dasar, dengan menengah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah. Implementasi literasi harus mencerminkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dengan akuntabilitas.

c. Tahapan Gerakan Literasi Sekolah

Berdasarkan Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam (Hasanah & Silitonga, 2020), kegiatan GLS adalah sebagai berikut :

1) Pembiasaan

Pada fase pertama ada pembiasaan. Proses pembiasaan merupakan hal yang fundamental. Pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Dalam konteks lembaga pendidikan, literasi memiliki peran penting bagi seluruh sumber daya manusia terlibat. Penilaian kinerja tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu mendapatkan perhatian dari pimpinan, tetapi juga mampu meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya evaluasi kinerja, pegawai berprestasi memiliki peluang mendapatkan promosi, pengembangan kompetensi, atau penghargaan. Sebaliknya, pegawai dengan kinerja rendah mungkin akan mengalami penurunan jabatan atau konsekuensi lain identik.

Dari penjelasan tersebut, mampu disimpulkan bahwa manajemen merupakan pencapaian hasil pada menjalankan tugas identik dengan tanggung

jawab diberikan. Peningkatan kinerja akan berdampak positif bagi organisasi atau lembaga. Dalam konteks, pencaan target kinerja menjadi salah satu sasaran utama. Keberhasilan pada mencapai sasaran tersebut bergantung pada kualitas sumber daya manusia dimilikinya.

Penerapan literasi di berbagai sekolah di Indonesia telah dilakukan, meskipun masih terdapat indikasi ketidaksiapan pada pelaksanaannya. Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap sekolah, sementara pada kenyataannya, masih menghadapi tantangan pada hal tenaga pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen.

Literasi memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi pada literasi memungkinkan menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala juga didorong semakin profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer.

Lebih jauh, literasi mendorong dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan warga sekolah dengan masyarakat, diperlukan pengelolaan pendidikan menerapkan literasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 27, disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dengan pengawasan pendidikan pada jenjang anak usia dini, dasar, dengan menengah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah. Implementasi literasi harus mencerminkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dengan akuntabilitas.

2) Pengembangan

Kegiatan literasi pada fase ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, kinerja memiliki peran penting bagi seluruh sumber daya manusia terlibat. Penilaian kinerja tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu mendapatkan perhatian dari pimpinan, tetapi juga mampu meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya evaluasi kinerja, pegawai berprestasi memiliki peluang mendapatkan promosi, pengembangan kompetensi, atau penghargaan. Sebaliknya, pegawai dengan kinerja rendah mungkin akan mengalami penurunan jabatan atau konsekuensi lain identik.

Dari penjelasan tersebut, mampu disimpulkan bahwa manajemen merupakan pencapaian hasil pada menjalankan tugas identik dengan tanggung jawab diberikan. Peningkatan kinerja akan berdampak positif bagi organisasi atau lembaga. Dalam konteks, pencaan target kinerja menjadi salah satu sasaran utama. Keberhasilan pada mencapai sasaran tersebut bergantung pada kualitas sumber daya manusia dimilikinya.

Penerapan literasi di berbagai sekolah di Indonesia telah dilakukan, meskipun masih terdapat indikasi ketidaksiapan pada pelaksanaannya. Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap sekolah, sementara pada kenyataannya, masih menghadapi tantangan pada hal tenaga pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen.

Literasi memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi pada literasi memungkinkan menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala juga didorong semakin

profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer. Lebih jauh, literasi mendorong dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan warga sekolah dengan masyarakat, diperlukan pengelolaan pendidikan menerapkan literasi.

3) Pembelajaran

Kegiatan literasi pada fase pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku pengayaan dan buku pelajaran. Dalam konteks lembaga pendidikan, kinerja memiliki peran penting bagi seluruh sumber daya manusia terlibat. Penilaian kinerja tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu mendapatkan perhatian dari pimpinan, tetapi juga mampu meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya evaluasi kinerja, pegawai berprestasi memiliki peluang mendapatkan promosi, pengembangan kompetensi, atau penghargaan. Sebaliknya, pegawai dengan kinerja rendah mungkin akan mengalami penurunan jabatan atau konsekuensi lain identik.

Pencapaian hasil pada menjalankan tugas identik dengan tanggung jawab diberikan. Peningkatan kinerja akan berdampak positif bagi organisasi atau lembaga. Dalam konteks, pencaan target kinerja menjadi salah satu sasaran utama. Keberhasilan pada mencapai sasaran tersebut bergantung pada kualitas sumber daya manusia dimilikinya. Penerapan literasi di berbagai sekolah di Indonesia telah dilakukan, meskipun masih terdapat indikasi ketidaksiapan pada pelaksanaannya. Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap sekolah, sementara pada kenyataannya, masih menghadapi tantangan pada hal tenaga pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen.

Literasi memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi pada literasi memungkinkan menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala juga didorong semakin profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer. Lebih jauh, literasi mendorong dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan warga sekolah dengan masyarakat.

3. Prestasi Belajar

a. Definisi Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni "prestasi" dan "belajar", yang memiliki arti berbeda. Untuk memahami lebih jauh tentang pengertian prestasi belajar, peneliti menjabarkan makna dari kedua kata tersebut. Penilaian tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu mendapatkan perhatian dari pimpinan, tetapi juga mampu meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya evaluasi kinerja, pegawai berprestasi memiliki peluang mendapatkan promosi, pengembangan kompetensi, atau penghargaan. Sebaliknya, pegawai dengan kinerja rendah mungkin akan mengalami penurunan jabatan atau konsekuensi lain identik. Dari penjelasan tersebut, mampu disimpulkan bahwa manajemen merupakan pencapaian hasil pada menjalankan tugas identik dengan tanggung jawab diberikan. Peningkatan kinerja akan berdampak positif bagi organisasi atau lembaga. Dalam konteks, pencaan target kinerja menjadi salah satu sasaran utama. Keberhasilan pada mencapai sasaran tersebut bergantung pada kualitas sumber daya manusia dimilikinya.

Penerapan literasi di berbagai sekolah di Indonesia telah dilakukan, meskipun masih terdapat indikasi ketidaksiapan pada pelaksanaannya. Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab

pemerintah pusat terhadap sekolah, sementara pada kenyataannya, masih menghadapi tantangan pada hal tenaga pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen. Literasi memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi pada literasi memungkinkan menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala juga didorong semakin profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer.

Literasi mendorong dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan warga sekolah dengan masyarakat, diperlukan pengelolaan pendidikan menerapkan literasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 27, disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dengan pengawasan pendidikan pada jenjang anak usia dini, dasar, dengan menengah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah. Implementasi literasi harus mencerminkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dengan akuntabilitas materi pelajaran yang didapatkannya selama mengikuti proses pembelajaran

b. Pengukuran Prestasi Belajar

Pengukuran prestasi belajar merupakan bagian yang penting dalam proses belajar mengajar, karena dengan pengukuran tersebut dapat ditentukan tingkat keberhasilan suatu program sekaligus juga dapat dinilai baik. Dalam konteks lembaga pendidikan, kinerja memiliki peran penting bagi seluruh sumber daya manusia terlibat. Penilaian kinerja tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu mendapatkan perhatian dari pimpinan, tetapi juga mampu meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya evaluasi kinerja, pegawai berprestasi memiliki peluang mendapatkan promosi, pengembangan kompetensi, atau penghargaan. Sebaliknya, pegawai dengan kinerja rendah mungkin akan mengalami penurunan jabatan atau konsekuensi lain identik. Dari penjelasan tersebut, mampu

disimpulkan bahwa manajemen merupakan pencapaian hasil pada menjalankan tugas identik dengan tanggung jawab diberikan. Peningkatan kinerja akan berdampak positif bagi organisasi atau lembaga. Dalam konteks, pencaan target kinerja menjadi salah satu sasaran utama. Keberhasilan pada mencapai sasaran tersebut bergantung pada kualitas sumber daya manusia dimilikinya.

Salah satu kendala dihadapi perbedaan persepsi terkait kebijakan otonomi pendidikan. Beberapa pihak menganggap otonomi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap sekolah, sementara pada kenyataannya, masih menghadapi tantangan pada hal tenaga pendidik, pendanaan, serta pengelolaan manajemen. Literasi memberikan keleluasaan serta kewenangan lebih besar bagi pada mengelola sumber daya, disertai dengan tanggung jawab harus dipenuhi. Otonomi pada literasi memungkinkan menyusun strategi pengelolaan identik dengan kondisi setempat, termasuk kesejahteraan guru agar mereka mampu lebih fokus pada tugasnya. Dengan kebebasan ini, kepala juga didorong semakin profesional pada menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus manajer.

Lebih jauh, literasi mendorong dengan guru berinovasi pada pengelolaan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum efektif dengan responsif terhadap keperluan lokal, mampu memastikan layanan pendidikan lebih identik dengan tuntutan peserta didik dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui keterlibatan warga sekolah dengan masyarakat, diperlukan pengelolaan pendidikan menerapkan literasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 27, disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dengan pengawasan pendidikan pada jenjang anak usia dini, dasar, dengan menengah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah. Implementasi literasi harus mencerminkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dengan akuntabilitas. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia dalam konteks pembelajaran memiliki peran penting sebagai wadah untuk bertukar pengalaman, pengetahuan, serta mengembangkan strategi pengajaran yang efektif.

D. Landasan Kebijakan

1. Kebijakan Literasi

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki tujuan yang terkait dengan literasi. Salah satu tujuan pendidikan nasional dijabarkan tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki tujuan yang terkait dengan literasi. Salah satu tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam Undang-Undang ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks literasi, tujuan ini dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan baca dan menulis, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang ini, pendidikan diselenggarakan dengan menulis, yang menunjukkan bahwa literasi diperlukan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional (Tambun et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kemampuan literasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kemampuan literasi dengan beberapa cara. Pertama, undang-undang ini menekankan pentingnya perpustakaan sebagai sumber informasi dan pendidikan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Kedua, undang-undang ini memperluas fungsi perpustakaan dari/ sebagai tempat penyimpanan buku menjadi pusat pendidikan dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Ketiga, undang-undang ini juga menekankan pentingnya peran pustakawan dalam mengembangkan kemampuan literasi masyarakat, dengan memberikan mereka wewenang untuk mengembangkan program-program pendidikan dan informasi yang dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan

kemampuan literasi masyarakat melalui pengembangan fungsi dan peran perpustakaan yang lebih luas dan efektif (Oktaviana, 2022).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan juga memperkuat peran perbukuan dalam meningkatkan kemampuan literasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan memperkuat peran perbukuan dalam meningkatkan kemampuan literasi. Pasal 4 butir c dari undang-undang ini menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh Warga Negara Indonesia (Toruan & Saifulloh, 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 14 April 2014. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang mengatur tentang perpustakaan. Dalam peraturan ini, didefinisikan bahwa perpustakaan adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat informasi, pendidikan, dan budaya, serta sebagai tempat penyimpanan dan pengembangan karya ilmiah dan budaya (Pemerintah, 2014)

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti adalah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2015. Peraturan ini bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti, yang didefinisikan sebagai perilaku dan sikap yang positif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, di sekolah. Peraturan ini meminta setiap sekolah untuk memiliki pola pembiasaan positif dan mengembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di sekolah, keluarga, dan masyarakat (Kemendikbud, 2015)

2. Kebijakan Prestasi Belajar

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3. Pasal 3 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

menjelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pasal 3 ayat 1 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak ditemukan dalam sumber yang disediakan. Pasal 3 dari Undang-Undang ini sebenarnya berbunyi: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab." Pasal 36 ayat 1 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak ditemukan dalam sumber yang disediakan. Pasal 36 ayat 2 dari Undang-Undang ini sebenarnya berbunyi: "Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa. Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, yang mengatur tentang penilaian prestasi belajar siswa .

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mencakup standar lulusan dan standar isi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mencakup standar lulusan dan standar isi, serta beberapa aspek lainnya yang terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia. Berikut adalah detail lebih lanjut tentang isi peraturan ini:

- a. Standar Nasional Pendidikan: Peraturan ini mendefinisikan Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Standar Isi: Standar isi adalah bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang mengatur tentang materi yang harus dipelajari oleh siswa di setiap tingkat pendidikan. Standar isi ini memastikan bahwa materi yang dipelajari siswa relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global.
- c. Standar Lulusan: Standar lulusan adalah bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang mengatur tentang kualifikasi yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan formal. Standar lulusan ini memastikan bahwa siswa memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri
- d. Lingkup Standar Nasional Pendidikan: Peraturan ini juga mencakup standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar pendidikan nonformal. Standar proses mengatur tentang caracara yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sedangkan standar pendidik dan tenaga kependidikan mengatur tentang kualifikasi dan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan nonformal mengatur tentang jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
- e. Ujian Nasional: Peraturan ini juga mengatur tentang Ujian Nasional yang dilakukan untuk siswa SD/MI/SDLB. Ujian ini dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar bagi sistem pendidikan di Indonesia, memastikan bahwa pendidikan di Indonesia memenuhi standar minimal yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa (Pemerintah, 2005).

3. Kebijakan Tujuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (b) Adalah sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maka dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan dalam hal ini

- a. Kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV;
- b. Kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional;
- c. Sertifikat pendidik.

Merujuk pada undang-undang di atas, maka pembentukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahwa tujuan umum adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Sedangkan tujuan khusus pembentukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah

- a. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan;
- b. Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan siswa;
- c. Membangun kerja sama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran

4. Kebijakan Manajemen Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 disebutkan bahwa “ Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang standart akademik dan kualifikasi guru dimana mengenai standar kualifikasi

akademik yang wajib dipenuhi oleh seorang guru berikut kompetensi yang harus dikuasainya. Maka adanya musyawarah guru mata pelajaran merujuk kepada kompetensi yang harus ada pada seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yaitu :

- a. Pendalaman materi, dimana kegiatan yang dilaksanakan guru untuk lebih meningkatkan penguasaan terhadap materi esensial (utama) yang menyangkut tujuan akademis untuk meningkatkan kepercayaan diri akan kemampuan profesionalnya sehingga tidak ragu dalam KBM, memperdalam dan memperluas wawasan;
- b. Merumuskan masalah, dimana berkaitan dengan tugas guru dalam proses belajar seperti bahan ajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Aspek-aspek kekurangan para guru masing-masing dirumuskan secara jelas sehingga program yang dilaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru;
- c. Menyusun rencana kegiatan; disusun berdasarkan analisis masalah dan skala prioritas.
- d. Kerangka Konseptual, dimana Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah pengembangan potensi serta profesionalisme guru sesama guru mata pelajaran untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang dihadapi guru.

5. Kebijakan Manajemen Evaluasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 41: dimana menyebutkan kewajiban guru untuk mengikuti pengembangan profesi, yang salah satunya melalui pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Sebagai bentuk perwujudan undang-undang di atas maka kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui bentuk suatu interaksi sesama guru mata pelajaran yang memiliki latar belakang dan tugas yang sama. Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan wadah organisasi yang didalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan evaluasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dilakukan untuk mengukur sejauh mana yang tertera pada rencana program tahunan.

E. Penelitian Terdahulu yang relevan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan Penelitian
1.	“Manajemen Budaya Literasi Informasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU Ponjen “	Winarsih , 2022	jenis penelitian kualitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Perencanaan budaya literasi informasi dengan mengadakan rapat kecil antar anggota guru dan selanjutnya diagendakan untuk rapat besar, dari rapat tersebut menghasilkan pembentukan tim literasi yang terdiri dari guru-guru dan diketuai oleh guru ahli dalam bidang literasi, selanjutnya program literasi disosialisasikan ke seluruh warga madrasah; 2) Penggerakan budaya literasi informasi dilakukan secara langsung dan oleh seluruh warga madrasah.

				Pengerakan dibebankan oleh tim literasi madrasah yang sudah terbentuk. Siswa dan guru juga membantu pengerakan sehingga literasi berjalan dengan baik. 3) Pengawasan budaya literasi informasi dalam meningkatkan kinerja guru di MI Ma'arif NU Ponjen, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan: a) Pengawasan secara langsung, pengawasan ini dilakukan oleh seluruh staf, guru, tim literasi, peserta didik, dan staf perpustakaan sebagai penyedia bahan bacaan. b) Pengawasan tidak langsung, pengawasan ini berfokus pada penulisan jurnal membaca siswa, dan jurnal membaca seluruh warga madrasah artinya pengawasan lewat hasil membaca dituangkan lewat tulisan pada jurnal membaca
--	--	--	--	--

				yang sudah disediakan oleh madrasah atau tim literasi
2.	Manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas Kota Metro	Amri, 2022	jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ditemukan bahwa: manajemen MGMP PAI SMA Kota Metro masih perlu ditingkatkan lagi, hal tersebut berdasarkan temuan: (1) Perencanaan musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama islam di sekolah menengah atas kota Metro: penyusunan program, jadwal dan tempat kegiatan MGMP kurang efektif, pengembangan silabus dan melakukan amp, dan kkm belum optimal, dan perumusan model pembelajaran dan alat-alat peraga praktik yang variatif sudah cukup baik, (2) Pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama islam di sekolah menengah atas kota Metro: memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin,

				peningkatan mutu kompetensi profesionalisme guru masih belum optimal, dan mengadakan lokakarya, simposium dan sejenisnya atas dasar inovasi manajemen kelas, manajemen pembelajaran efektif, (3) Evaluasi MGMP pendidikan agama islam di sekolah menengah atas kota Metro: mengembangkan program layanan supervisi akademik dan klinis, dan perlu peningkatan partisipasi aktif dalam kegiatan MGMP propinsi dan nasional serta berkolaborasi dengan MKKS dan sejenisnya secara kooperatif
3.	<i>“Coaching Model of Science Teacher Professionalism Through MGMP Teaching Clinic Management”</i>	Murniati, 2014	Desain penelitian adalah <i>research and development (R&D)</i> dengan	Kesimpulan menunjukkan bahwa pemberdayaan MGMP melalui <i>teaching clinic</i> dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam membangun dan mengembangkan profesionalisme guru ipa

			menggunakan pendekatan kualitatif.	smp. MGMP klinik pendidikan berfungsi sebagai tindak lanjut bantuan profesional yang diberikan kepada guru-guru yang bermasalah. Merekomendasikan guru ipa, MGMP, klinik manajemen pengajaran di dinas pendidikan dan instansi terkait sebagai model pembinaan dan pengembangan profesional guru melalui MGMP.
4.	“Pengembangan Bahan Diklat Pada MGMP Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan Di Smp Negeri Kota Makassar.	Manganni, 2016	Desain penelitian adalah <i>research and development (R&D)</i> dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh tiga ahli, yaitu ahli materi, ahli desain, dan ahli bahasa terhadap bahan diklat dapat disimpulkan bahwa bahan diklat valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada nilai rata-rata untuk uji materi yaitu 3,58, nilai rata-rata untuk uji desain yaitu 3,75, dan nilai rata-rata untuk uji

				bahasa yaitu 3,57. Semua nilai tersebut berada pada kategori valid. Kedua, untuk uji kepraktisan bahan diklat dilakukan pada 10 orang yang terdiri atas pengelola dan guru yang mengikuti MGMP PJOK. Berdasarkan hasil uji kepraktisan tersebut diperoleh bahwa bahan diklat yang diujikan praktis. Kesimpulan ini diperoleh didasarkan pada nilai rata-rata hasil uji kepraktisan yaitu 4,12. Ketiga, uji keefektifan. Data uji keefektifan diperoleh dari hasil uji pada 50 orang guru yang mengikuti MGMP PJOK. Berdasarkan hasil uji keefektifan diperoleh kesimpulan bahwa bahan diklat efektif digunakan pada MGMP PJOK untuk sekolah menengah pertama. Kesimpulan ini diperoleh dari data nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 4,27 dan berdasarkan pada rentang
--	--	--	--	--

				skala 4,21 – 5,00 dan berada pada kategori sangat efektif. Keefektifan bahan diklat sekaligus menunjukkan bahwa MGMP PJOK sangat dibutuhkan kehadirannya dalam proses diklat di MGMP PJOK. Bahan diklat ini digunakan dalam rangka untuk menjadi pedoman atau pegangan baik pengurus, instruktur, dan guru dalam melaksanakan kegiatan MGMP. Keempat, pengembangan bahan diklat MGMP PJOK dilakukan dengan memerhatikan kurikulum yang berlaku nasional. Pengembangan ini juga dilakukan atas dasar kebutuhan guru di sekolah dalam mendesain dan mengajarkan pjok
5.	“Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Literasi Membaca	Katoning sih, 2019	Desain penelitian adalah <i>research and developme</i>	Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut (1) Manajemen pelatihan masih memerlukan inovassi agar pelatihan menjadi lebih efektif; (2) Penerapan

	Berorientasi PISA Berbasis Mobile Learning Untuk Guru Bahasa Inggris Di Kota Semarang”		nt (R&D) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	manajemen pelatihan literasi membaca berorientasi PISA berbasis mobile learning sebagai solusi dan inovasi dalam proses pelatihan; (3) Model final efektif dalam meningkatkan kemampuan guru dalam literasi membaca berorientasi PISA berbasis mobile learning.
6.	“ Pengaruh Pelatihan MGMP Dan Insentif Guru Terhadap Kinerja Guru Di Mts Swasta Se-Kecamatan Curup”.	Maghfira ,2021	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif	Hasil dari penelitian ini ialah analisis regresi pada tingkat kepercayaan 5% menunjukkan bahwa pelatihan MGMP dan insentif memberikan kontribusi sebesar 71,89% terhadap kinerja guru di MTS swasta se-Kecamatan Curup dan kontribusi parsial dari pelatihan MGMP sebesar 53,3% dan insentif sebesar 62,8%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh pelatihan MGMP dan insentif secara signifikan terhadap kinerja guru dengan kategori tinggi.

				Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru di MTS swasta se-Kecamatan Curup secara keseluruhan dipengaruhi oleh tingkat pelatihan MGMP dan besarnya insentif
7.	Manajemen Program Literasi Perpustakaan Untuk Membentuk Karakter Disiplin Dan Kreatif Dalam Membaca Di SMA Negeri 1 Sampang.	Khaqiqi, 2022	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: perencanaan dalam program literasi perpustakaan dilakukan dengan menentukan tujuan, membuat rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, memfungsikan perpustakaan dengan baik, menentukan jadwal pelaksanaan program, menentukan guru pendamping sebagai pengawas dan siswa yang melaksanakan program literasi, serta pembuatan jurnal literasi. Pengorganisasian dalam program literasi perpustakaan dilakukan dengan menetapkan struktur

				organisasi serta deskripsi kerjanya, pembagian tugas untuk kegiatan sosialisasi, menyusun prosedur pelaksanaan program, pengelompokan fasilitas pendukung program literasi, serta pemilihan bahan bacaan siswa. Pelaksanaan program literasi perpustakaan meliputi kegiatan meminjam buku yang akan dibaca, membaca buku sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, membuat resume pada jurnal dari hasil bacaan, mengumpulkan jurnal literasi tepat waktu, mengembalikan buku bacaan tepat waktu. Proses pelaksanaan program terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Evaluasi dalam program literasi perpustakaan dilakukan untuk mengukur
--	--	--	--	---

				keberhasilan pelaksanaan program dalam membentuk karakter disiplin dan kreatif siswa melihat dari hasil pemeriksaan jurnal literasi secara rutin, mengadakan perlombaan setiap bulan bahasa, dan menilainya berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Penggunaan sistem poin adanya punishment berupa sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dan reward berupa hadiah kepada siswa yang aktif dan patuh pada peraturan dengan mendayagunakan guru pendamping sebagai evaluator siswa. Program literasi perpustakaan yang terkontrol melalui jurnal literasi ini dilakukan secara berkelanjutan, akan meningkatkan minat baca siswa dan terbentuk karakter disiplin dan kreatif siswa dalam membaca
--	--	--	--	--